



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jalan Merdeka, Karang Mulia, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah 988111

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : SETDA- PPT
Nomor surat : 000.3.1 /951 /Set / 2026
Tanggal : 23 Juli 2026

No. Agenda : 613
Diterima Tgl : 23 Juli 2026

Sifat :

Segera ☒ Sangat Segera ☐ Rahasia ☐

Perihal :

Pendampingan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa pemerintah

Diteruskan kepada Sdr (I) :

- ☐ Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- ☐ Kabid. Perbendaharaan Akuntansi & Pelaporan
- ☐ Kabid. Barang Milik Daerah
- ☐ Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- ☐ Kabid. Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
- ☐ Kasubbag Keuangan Daerah
- ☐ Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- ☐ Kasubbag Perencanaan dan Program

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Untuk diketahui umum/diumumkan kpd staf
- ☐ Harap diteliti dan dilengkapi
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Buat konsep jawaban untuk saya
- ☐ Harap saudara selesaikan
- ☐ Bicarakan pada rapat
- ☒ File TU Sekretariat

Catatan / Instruksi :

*mohon disempurnakan kepada paksa
paket pekerjaan pengad barang & jasa
sesuai dgn surat terlampir ini*

Nabire, 23 Juli 2026

BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Sekretaris,

STEFANUS PEKEI, S.E., M.AK
Penata Tk I
NIP. 19851223 201205 1 001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Papua Tengah 98811, Pos-el provpapatengah@gmail.com

Nabire, 23 Juli 2026

Nomor : 000.3.1/951/SET/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Pendampingan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Yth.

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah
di
Tempat

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah tanggal 30 Juni 2026 Nomor 000.3.1/807/SET/2026 tentang Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memerlukan informasi regulasi terkait, tata cara, dan pengetahuan teknis tentang pelaksanaan konsolidasi paket pekerjaan, agar menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Surat permohonan dimaksud agar dilampirkan dengan daftar usulan paket yang akan dikonsolidasikan beserta data pendukung yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah,


Silwanus A. Soemoele

Tembusan:

1. Gubernur Papua Tengah;
2. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah.

Lampiran

Nomor Surat : 000.3.1 / 951 / SET / 2026

Tanggal : 23 Juli 2026

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

- ① 1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Sosial.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
13. Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
15. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
16. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan.
17. Dinas Kelautan dan Perikanan.
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan.
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.
20. Dinas Perhubungan.
21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
22. Inspektorat.
23. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tengah.
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
25. Satuan Polisi Pamong Praja.
26. Biro Umum.
27. Biro Hukum.
28. Biro Organisasi.
29. Biro Perekonomian dan Pembangunan
30. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat